

# **PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN**

**EDISAH PUTRA NAINGGOLAN**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email : ediputrafeumsu@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine how much influence the quality of the budget and the budget of the knowledge of budgetary surveillance in the North Sumatra Police and to determine how much influence the quality of budget and knowledge of budgets together to control the budget at the North Sumatra Police. Based on the type of problem studied, the place and time that is done as well as the techniques and tools used in the study, the method used is the method of causal with descriptive research. Population and sample in this research is to use the technique census numbering 104 people. Research shows that there is a budget to influence the quality of budget control, no influence on the knowledge of the budget and budget control there budgets influence the quality and knowledge of budgets together to control the budget at the North Sumatra Police, according to the coefficient test value  $t_{count} > t_{table}$ . Results of regression testing for the variable quality of the budget to the budget control shows the  $t$  value  $>$  table, then the hypothesis  $H_a$  is acceptable. Thus the quality of budgetary positive and significant effect on budget control. While the regression test results for the variable knowledge of budgets to control the budget shows the value of  $t_{count} > t_{table}$ , then the hypothesis  $H_a$  is acceptable. Thus the quality of budgetary positive and significant effect on budget control. Test results menunjukkan the positive influence together quality budget and knowledge of budgets together to control the budget. This means that with good supervision and good knowledge will provide a good quality budget as well.*

*Keywords: Quality Articles, Knowledge About Budget and Budget Control*

## **PENDAHULUAN**

Sejak dilakukannya Amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Kemudian setelah terjadinya amandemen ketiga terhadap UUD 1945 tersebut khususnya pasal 23C ditindak lanjuti dengan mengundang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada tanggal 5 April 2003 sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan Negara dan diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam

pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang baik, meskipun dengan terbitnya paket Undang-Undang bidang keuangan dan berbagai Undang-undang pendukung tersebut belum tentu dapat mewujudkan suatu grand desain konstruksi sistem yang utuh dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang baik. Akan tetapi hal-hal yang mendasar dalam undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi pengawasan.

Artinya, saat ini para satuan kerja kementerian/lembaga sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan di satuan kerjanya masing-masing. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, juga sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan. Konsekuensi logis berlakunya paket undang-undang di atas telah membawa berbagai perubahan-perubahan. Salah satu perubahan tersebut antara lain adalah adanya budgeting reform atau reformasi penganggaran. Reformasi tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam penganggaran yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender (Mardiasmo, 2002).

Perubahan dari traditional budget ke *performance budget* (anggaran kinerja), merupakan usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: 1) Komprehensif dan komparatif, 2.) Terintegrasi dan lintas departemen, 3) Proses pengambilan keputusan yang rasional, 4) Berjangka panjang, 5) Spesifikasi tujuan dan perangsangan prioritas, 6) Analisis total cost dan benefit, 7) Berorientasi input, output, dan outcome, dan 8) Adanya pengawasan kinerja.

Dengan demikian, pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan manajemen keuangan pemerintah yang merupakan konsekuensi logis dari reformasi anggaran yang telah melahirkan perubahan dari traditional budget ke performance budget akan menjadi kata kunci perubahan yang menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas, yaitu anggaran yang berbasis kinerja. Pada tahapan selanjutnya, ternyata anggaran yang berkualitas saja belum dapat menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Stoner (1982) mengemukakan bahwa suatu rencana mempunyai kemungkinan kecil untuk berhasil bila tidak dilakukan pengendalian. Dalam hal ini paling tidak terdapat tiga aspek utama yang dapat mendukung keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam anggaran yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2009).

Kegiatan pengawasan biasanya berkaitan dengan pengukuran prestasi atau pencapaian tujuan. Sarana yang digunakan dalam pengawasan diantaranya adalah anggaran. Dengan demikian kegiatan pengawasan dapat dipengaruhi oleh kualitas anggaran, karena dalam proses pengawasan tersebut anggaran dibandingkan dengan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya dalam pengawasan terhadap anggaran, maka dituntutlah untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep anggaran kinerja

Dalam perspektif penelitian ini, pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Itwasda Polda Sumut dalam mengawasi kinerja para kuasa pengguna anggaran yang terdiri dari satuan-satuan kerja di lingkungan Polda Sumut untuk mencegah dan menghindari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas kepada para kuasa pengguna anggaran harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Itwasda Polda Sumut sebagai salah satu satuan kerja yang mempunyai peran tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolnsian Negara Republik Indonesia Tingkat Kepolisian Daerah.

Pengawasan oleh Itwasda tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena Itwasda sangat menentukan arah pencapaian kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Sumut, oleh karena itu Itwasda tentunya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep anggaran kinerja dan berbagai peraturan yang terkait dengan anggaran dan keuangan negara seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan lain-lain serta tata cara implementasi dan aplikasinya dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja, baik itu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada tahap pertanggungjawaban atau pelaporan.

Pengetahuan Itwasda Polda Sumut tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta Rencana Kerja dan Anggaran para satuan kerja,

bahwa mekanisme penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran pada masing-masing tahapan masih memiliki banyak keterbatasan untuk memperoleh perencanaan maupun penetapan yang didukung oleh proses penganggaran yang benar-benar menerapkan uji kewajaran, uji relevansi maupun uji validitas data yang digunakan untuk menyusun anggaran.

Hal ini terjadi karena dalam mekanisme tersebut Itwasda Polda Sumut tidak dilibatkan secara langsung dan hanya dapat melaksanakan verifikasi dan supervisi tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran para satuan kerja di lingkungan Polda Sumut. Apabila Itwasda tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan, maka sangat mungkin pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan, padahal fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Itwasda terhadap rencana kerja dan Anggaran para satuan kerja juga sangat terkait dengan tahap pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Fenomena yang muncul terkait dengan pengawasan anggaran adalah terjadinya perbedaan antara anggaran dan realisasi penyerapan anggaran di beberapa satuan kerja dan satuan wilayah hingga bulan Juni 2013 yang terlalu tinggi dan terlalu rendah (35% - 60%). Berarti kurangnya pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan Kepala Seksi Pengawasan di beberapa wilayah sehingga terjadinya penyimpangan ini (Sumber : berdasarkan hasil review Laporan Realisasi Anggaran Semester I yang dilakukan Itwasda Polda Sumut bekerjasama dengan BPKP).

Penyerapan anggaran yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, hal ini berarti kualitas anggaran belum begitu baik dan pengetahuan tentang anggaran di Polda Sumut kebanyakan personilnya berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum yang membuat pengawasan terhadap anggaran tidak efektif.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan sarana yang penting untuk pengendalian dan perencanaan suatu organisasi (Anthony & Govindarajan, 2004). Anggaran adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan, yang berisikan rencana kegiatan di masa mendatang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi (Hansen dan Mowen, 2004). Sedangkan Lowe (1970) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan, direncanakan atau diperkirakan terjadi dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Sebagai rencana keuangan, anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja (Schiff dan Lewin, 1970). Di samping itu, anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya (Kenis, 1979).

Anggaran Sektor Publik adalah anggaran yang merupakan rencana untuk diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim et al., 2000), sementara Mardiasmo (2009) memberikan definisi anggaran, adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses pengoperasioanal rencana dalam bentuk

pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu (Halim et al., 2000).

### **Pengertian Pengawasan Anggaran**

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan (Revrison, 1999). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan dan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian Sondang, 1998). Pengawasan tidak saja diperlukan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga pada tahap perencanaan (Mardismo, 2009).

Kegiatan pengawasan biasanya berkaitan dengan pengukuran prestasi atau pencapaian tujuan. Sarana yang digunakan dalam pengawasan diantaranya adalah anggaran, dengan demikian kegiatan pengawasan dapat dipengaruhi oleh kualitas anggaran, karena dalam proses pengawasan anggaran tersebut dibandingkan dengan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.

### **Tujuan Pengawasan Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu.

Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.

Alamsyah (1997) menyatakan tujuan pengawasan anggaran adalah untuk :

1. menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan,
2. menjaga agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan,
3. menjaga agar hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pengertian Kualitas Anggaran**

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Secara garis besar menurut Enceng Koswara (2008), proses perencanaan dan penyusunan anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar yaitu :

1. Anggaran konvensional atau anggaran tradisional

Didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line item* yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya berdasarkan pada besarnya realisasi

anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru.

## 2. Anggaran dengan pendekatan *New Public Management* (Anggaran Berbasis Kinerja)

Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengawasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas. Dalam anggaran yang berbasis kinerja pembuatan prioritas tujuan untuk setiap kegiatan atau program menunjukkan tingkat kejelasan anggaran tersebut, sedangkan pendekatan yang sistematis dan rasional menunjukkan tingkat keakuratan dari anggaran yang disusun. Selain itu, pendekatan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah unit satuan kerja dan unit satuan wilayah di Polda Sumut. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 104 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus, karena seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu sejumlah 104 sampel. Penelitian ini menggunakan sampel besar ( $n = 30$ ).

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kualitas anggaran ( $X_1$ ), pengetahuan tentang anggaran ( $X_2$ ) dan variabel dependen yaitu pengawasan anggaran ( $Y$ ).

Definisi operasional dari variabel pada penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Kualitas Anggaran sebagai Variabel Independen

Kualitas anggaran dalam penelitian ini berhubungan dengan kualitas hasil kerja dari penyusunan anggaran yang dikerjakan oleh pegawai/karyawan dalam rangka menghasilkan suatu produk berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Karakteristik anggaran menurut Kenis dalam Robinson (2005) terdiri dari : (1) partisipasi penganggaran (2) kejelasan sasaran anggaran (3) umpan balik anggaran (4) evaluasi anggaran dan (5) tingkat kesulitan anggaran. Dalam penelitian tersebut untuk mengukur karakteristik anggaran digunakan 26 item pertanyaan dengan 5 skor skala Likert. Selain itu, ukuran kualitas anggaran berdasarkan karakteristik anggaran yang dikemukakan oleh Collins dalam Robinson (2005) yaitu : 1) *Accuracy*, 2) *Estimate Certainty*, 3) *Controllability*, dan 4) *Participation*.

Dalam penelitian ini untuk pengukuran kualitas anggaran mengacu pada karakteristik anggaran yang dikemukakan oleh Kenis dan Collins di atas, namun baik karakteristik maupun instrumen yang digunakan akan dilakukan

penyesuaian dan modifikasi, mengingat perbedaan objek yang akan diteliti. Dengan pertimbangan responden dalam penelitian ini adalah anggota Polda Sumut dan mempertimbangkan berbagai peraturan yang terkait, maka karakteristik anggaran yang akan digunakan untuk mengukur kualitas anggaran adalah (1) kejelasan anggaran (2) evaluasi anggaran dan (3) keakuratan anggaran, sedangkan karakteristik lainnya seperti partisipasi dan umpan balik adalah bagi pihak kewilayahan sehingga tidak dapat diukur melalui penelitian ini.

Untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran menggunakan 8 item pertanyaan, evaluasi anggaran digunakan 8 item pertanyaan, dan untuk keakuratan anggaran ada 5 item pertanyaan jadi secara total untuk mengukur kualitas anggaran digunakan 21 item pertanyaan yang masing-masing menggunakan skala Likert dengan skor dari 1 sampai dengan 5.

## 2. Pengetahuan Tentang Anggaran sebagai Variabel Independen

Pengetahuan tentang anggaran adalah kemampuan dalam hal menyusun anggaran, deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.

Instrumen pengukuran pengetahuan tentang anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan tentang cara penyusunan anggaran dan pemahaman tentang konteks anggaran yang berbasis kinerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Sopanah (2003) dan Werimon (2007) ukur menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Jawaban diberi skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk kurang setuju, skor 2 untuk tidak setuju dan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Skor tertinggi menunjukkan tingginya pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

## 3. Pengawasan Anggaran sebagai Variabel Dependen

Pengawasan anggaran dalam penelitian ini adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan anggaran dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi, diantaranya penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Instrumen kemudian diukur dengan menggunakan indikator 8 item pertanyaan untuk menanyakan aktivitas pengawasan. Pengukuran menggunakan 5 skor skala Likert dengan skor 1 untuk pilihan sangat tidak setuju sampai skor 5 untuk menyatakan sangat setuju. Jawaban diberi skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk kurang setuju, skor 2 untuk tidak setuju dan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Skor tertinggi menunjukkan baiknya pengawasan anggaran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hasil pengukuran reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Uji Reliabilitas data**

Variabel	Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Anggaran (X1)	0,957	0,60	Reliabel
Pengetahuan Tentang Anggaran (X2)	0,747	0,60	Reliabel
Pengawasan Anggaran(X3)	0,813	0,60	Reliabel

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri pengujian normalitas, multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas, diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda.

**Tabel 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.410	3.251		.126	.900
KA	.205	.058	.394	3.522	.001
PTA	.369	.098	.421	3.767	.000

a. Dependent Variable:  
PA

Berdasarkan tabel coefficient (4.4) di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{Pengawasan Anggaran} = 0,410 + 0,205 \text{ KA} + 0,369 \text{ PTA} + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,410 artinya jika nilai Kualitas Anggaran dan Pengetahuan tentang Anggaran 0 maka Pengawasan Anggaran bernilai 0,410 Koefisien regresi variabel  $X_1$  (Kualitas Anggaran) sebesar 0.205, artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel  $X_1$  (Kualitas Anggaran) mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Pengawasan Anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,205. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kualitas Anggaran dengan Pengawasan Anggaran, semakin naik variabel Kualitas Anggaran maka semakin meningkat Pengawasan Anggaran.

Koefisien regresi variabel  $X_2$  (Pengetahuan Tentang Anggaran) sebesar 0.369, artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel  $X_2$  (Pengetahuan Tentang Anggaran) mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Pengawasan Anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0.369. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Anggaran, semakin naik variabel Pengetahuan Tentang Anggaran maka semakin meningkat Pengawasan Anggaran.



Hasil perhitungan SPSS pada tabel di atas diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar 3,522. Nilai  $t_{hitung}$  di atas akan diperbandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ . Pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan  $dk = n - 2$  atau  $66 - 2 = 64$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh angka  $t_{tabel}$  sebesar 1,997. Didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $3,522 > t_{tabel}$  1,997 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar 3,767. Nilai  $t_{hitung}$  di atas akan diperbandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ . Pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan  $dk = n - 2$  atau  $66 - 2 = 64$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh angka  $t_{tabel}$  sebesar 1,997. Didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $3,767 > t_{tabel}$  1,997 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu : kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran. Dengan demikian penelitian ini mendukung bahwa kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi) berpengaruh positif terhadap pengawasan anggaran, hal ini berarti kualitas anggaran mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Itwasda Polda Sumut terhadap anggaran. Kemudian pengetahuan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran. Dengan demikian penelitian ini mendukung bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan anggaran, hal ini berarti pengetahuan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Itwasda Polda Sumut terhadap anggaran. Dan kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi) dan pengetahuan tentang anggaran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran. bahwa kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi) dan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan anggaran, hal ini berarti kualitas anggaran mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Itwasda Polda Sumut terhadap anggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Kamaruddin. 2000. *Akuntansi Manajemen (Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan di Kabupaten)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal. 2009. *Dasar-dasar Anggaran*, Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Alamsyah. 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Alif. 2010. *Pengaruh Pengetahuan, Regulasi, dan Perilaku Pegawai Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran*. Tesis : Program Pasca Sarjana, Unand: Padang.

- Anthony Robert N, J Dearsen dan Vijay Govindarajan, 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Control System, Eleven Edition*, Mc Graw-Hill Companies, Inc, U.S.A.
- Basri Zein, 1993. *Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Keefektifan Pengendalian Anggaran Proyek*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Basuki Rahmat, 2001. *Penataan Mekanisme dan Kelembagaan Pengawasan APBD oleh DPRD dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dalam Abdul Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.
- Collins, Frank, 1978. "The Interaction of Budget Characteristics and Personality Variables with Budgetary Respons Attitudes". *The Accounting Review*. Vol. LXIII, No.2, April.pp.324-335.
- Erlina., Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Terbitan Pertama, USU Pres, Medan.
- Garrison.R.H,1991. *Managerial Accounting: Concept for Planning, Control, Decision Making*, Richard D Irwin Inc, U.S.A.
- Ghozali,I dan R.Y. Fahrianta, 2002. "Pengaruh Tidak Langsung Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen Ekonomi*, Vol.2, No.1, Februari 2002.
- \_\_\_\_\_,2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. BP. Undip Semarang.
- Hair, Joseph F, et al., 1998. *Multivariate Data Analysis, 5th Edition*, Prentice-Hall, Inc.
- Halim, A.A Tjahyono dan M.F Husein,2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*,Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hansen, D.R., Mowen,M,2004. *Management Accounting*. Terjemahan Dewi Fitriasari. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hanson,E.I,1996. The Budgetary Control Function, *The Accounting Review*. April, Hal.239-243.
- Hilmi Abdullah,2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Kenis, Izzetin,1979. "Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes ang Performance". *The Accounting Review*. Vol.LIV, No.4, October.pp.707-721.
- Lowe,E,1970. *A Budgetary Control: An Evaluation in Wider Managerial Perspective*. November.pp.765.
- Mardiasmo, 2009. "Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol.3,Agustus, Hal.441-456.
- \_\_\_\_\_,2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nugroho,A.B,2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Dengan SPSS*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pramono,A.H, 2002. *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 5 April 2003, Citra Umbara, Bandung.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Jakarta
- Revrisond Baswir,1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPEE, Yogyakarta.
- Rini Andriani, 2002. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran dan RPPs (Rules, Procedures and Policies) terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Riyadi,S, 2000. Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.3, No.2, Hal. 134-150.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods for Business*. Jilid 1 dan 2, Penerjemah Kwan Men Yon, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sharma,S., R.M. Durrand, and O. Gur- Arie, 1981. "Identification and Analysis if Moderator Variables". *Journal of Marketing Research*. 18 Agustus.pp.291-300.
- Siagian Sondang, 1998. *Management Startegic*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sopannah,M, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA VI Surabaya, Oktober.2003.pp.1160.
- Sri Murni dan B witono, 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Perspektif, Vol.9.
- Sugiyono,2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto, 2005. *Analisis Data Untuk Riset Pemasaran*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syahrudin,. Werry DT, 2002. *Peranan DPRD untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah tentang Pelaksanaan Desentralisasi*. Pusat studi Kependudukan Universitas Andalas, Padang.
- Umar, Husein, 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Werimon,S., dkk., 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Makalah SNA X, Makassar.